

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) PADA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS: DESA KEMBANG KUNING DAN PASAR SENIN)

Maulida¹, Reno Affrian², Agus Surya Dharma³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: imauumaulida@gmail.com

ABSTRAK

Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat bertujuan menyediakan air bersih yang terjangkau untuk setiap lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui *purposive* informan berjumlah 10 orang. Hasil dari penelitian cukup baik hal ini dapat dilihat dari: Pertama) standar dan sasaran kebijakan, meliputi kejelasan kebijakan cukup baik dan sasaran kebijakan cukup baik. Kedua) Sumber daya, meliputi adanya dukungan finansial belum terkelola dengan baik, adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai belum baik. Ketiga) Komunikasi antar badan pelaksana meliputi koordinasi antar instansi dan koordinasi antar pelaksana cukup baik. Keempat) Karakteristik badan pelaksana meliputi dukungan birokrasi cukup baik. Kelima) Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik meliputi lingkungan sosial belum baik, lingkungan ekonomi dan politik cukup baik. Keenam) Sikap pelaksana meliputi pemahaman program dan sikap atas kebijakan cukup baik. Faktor yang mempengaruhi terdiri dari : 1) Faktor pendukung adanya dukungan finansial dalam menunjang pamsimas 2) Faktor penghambat Sebagian masyarakat menolak menggunakan bantuan pamsimas dan kurangnya partisipasi masyarakat, maka disarankan : Kepada Kepala Desa agar melakukan pengawasan lebih detail lagi terhadap jalannya pamsimas. Kepada pengelola pamsimas agar mengelola sarana dan prasarana pamsimas dengan baik. Kepada masyarakat hendaknya menggunakan pamsimas dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Implementasi, Pamsimas

ABSTRACT

The Community-Based Drinking Water and Sanitation Provision Program aims to provide affordable clean water for every level of society. This research uses a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data source was taken purposively from 10 informants. The results of the research are quite good, this can be seen from: First) policy standards and targets, including quite good policy clarity and quite good policy targets. Second) Resources, including financial support, have not been well managed, and adequate human resource support has not been good. Third) Communication between implementing agencies includes coordination between agencies and coordination between implementers is quite good. Fourth) The characteristics of the implementing agency include fairly good bureaucratic support. Fifth) The conditions of the social, economic and political environment include the social environment not being good, the economic and political environment being quite good. Sixth) The attitude of the implementer includes understanding the program and attitude towards the policy quite well. The influencing factors consist of: 1) Supporting factors: financial support to support Pamsimas. 2) Inhibiting factors. Some people refuse to use Pamsimas assistance and there is a lack of community participation. It is recommended that: The Village Head carry out more detailed supervision of the running of Pamsimas. To Pamsimas managers to manage Pamsimas facilities and infrastructure well. The community should use Pamsimas and actively participate in its implementation.

Keywords: Implementation, Pamsimas

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang PENCEPATAN Air Minum Dan Sanitasi (Pamsimas), air juga penting bagi lingkungan pertanian dan bisnis, aplikasi industri dan kimia, proses sanitasi, fasilitas rekreasi, dan pengolahan makanan. Hal itu dikarenakan jumlah limbah air di Indonesia sangat besar tetapi belum menjamin ketersediaan jumlah air bersih. Kebutuhan air bersih tidak menjadi hal yang utama bagi sebagian masyarakat karena sulitnya akses untuk mendapatkan air bersih, terutama air minum yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Penyediaan fasilitas sanitasi layak sangat bergantung pada ketersediaan air minum yang layak. Begitu pun sebaliknya, untuk mendapatkan air minum yang aman diperlukan upaya pengelolaan sanitasi yang baik. Penyediaan air bersih dan sanitasi merupakan target tujuan MDGs sebagai paradigma pembangunan, diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat. Dengan kata lain untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh air bersih dan sanitasi.

Masalah pemenuhan kebutuhan air bersih ini memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah maupun masyarakat, mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga masyarakat. Salah satu program pemerintah dalam penyediaan air bersih serta sanitasi adalah PAMSIMAS yaitu program yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam penyediaan air bersih serta mengatasi masalah sanitasi yang berbasis masyarakat terutama masyarakat perdesaan dan pinggiran kota. Dengan program tersebut masyarakat dapat mengakses air bersih serta diajarkan cara – cara perilaku hidup bersih dan sehat untuk dirinya sendiri, keluarga dan di lingkungan masyarakat.

Program Hibah Insentif Desa (HID) merupakan salah satu upaya program Pamsimas untuk mendorong berjalannya upaya keberlanjutan di tingkat desa. Hibah Insentif Desa adalah salah satu Program Bantuan Langsung Masyarakat yang bertujuan Memberikan insentif atau penghargaan pada sejumlah desa (baik desa reguler maupun desa replikasi) yang telah melaksanakan program pamsimas I dengan baik dan melampaui standar kinerja dalam pengembangan hygiene, menggerakkan masyarakat dan mencapai target air minum dan sanitasi yang tertuang dalam RKM untuk mengembangkan lebih jauh kesehatan lingkungan dan pengembangan ekonomi mereka. Melalui program PAMSIMAS diharapkan masyarakat dapat memprioritaskan air bersih dan sanitasi, karena meskipun mereka berada pada ekonomi menengah kebawah, melalui berbagai kemudahan tersebut mereka tetap bisa mengakses fasilitas air dan sanitasi untuk keberlangsungan hidupnya. Maka dengan itu derajat kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat akan mengalami peningkatan sehingga pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia juga akan mengalami peningkatan yang baik. Kecamatan Amuntai Tengah mendapat bantuan dana Hibah Insentif yang berasal dari APBN yang akan digunakan untuk meningkatkan dan memperluas cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat sebagaimana yang telah direncanakan dalam PJM ProAksi. Pada Kecamatan Amuntai Tengah terdapat beberapa desa yang mendapatkan program PAMSIMAS salah satunya desa Kembang Kuning dan Pasar Senin, yang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat Program Pamsimas. Program Pamsimas serta pengelolaan sarana penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang pelaksanaan pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Kecamatan Amuntai Tengah merupakan wilayah yang berada pada Kabupaten Hulu Sungai Utara. Wilayah tersebut berada pada wilayah yang sebagian besar warganya adalah peternak ayam dan petani, sehingga dengan demikian warga sekitar sangat membutuhkan sekali air yang sangat bersih guna menunjang kegiatan sehari-hari. Walaupun daerah desa ini adalah di daerah banyaknya

sungai, tetapi untuk mendapatkan air yang bersih sangatlah susah sekali. Sehingga tidak semua warga menggunakan PAMSIMAS, karena sebagian warga telah memiliki sumber air sendiri, seperti sungai. Namun dilihat dari kualitas airnya, tidak semua air sungai yang dimiliki warga berkualitas baik, sehingga air sungai berbau dan kurang jernih. Melalui program PAMSIMAS diharapkan masyarakat desa Kembang Kuning dan Pasar Senin dapat memprioritaskan air bersih dan sanitasi, karena meskipun mereka berada pada ekonomi menengah kebawah, melalui berbagai kemudahan tersebut mereka tetap bisa mengakses fasilitas air dan sanitasi untuk keberlangsungan hidupnya. Maka dengan itu derajat kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat akan mengalami peningkatan sehingga pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia juga akan mengalami peningkatan yang baik. Namun berdasarkan hasil observasi penulis Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Pada Desa Kembang Kuning dan Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah masih terdapat beberapa permasalahan seperti :

1. Kebiasaan masyarakat menggunakan air sungai Masyarakat desa mempunyai kebiasaan menggunakan air sungai sejak zaman dahulu sehingga sebagian masyarakat menolak menggunakan bantuan PAMSIMAS, pada desa Pasar Senin pengguna pamsimas hanya 110 KK dan pada desa Kembang Kuning 50 KK.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola pamsimas Seharusnya sesuai dengan namanya berbasis masyarakat ,pamsimas harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun dalam pengelolaan namun hal tersebut tidak dilakukan masyarakat karena masyarakat merasa hal tersebut bukan tanggung jawabnya seperti tong-tong besar yang ada tidak terlalu berfungsi dan tidak terurus.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan dan menguraikan mengenai Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Pada Desa Kembang Kuning dan Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui *purposive* informan berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan *member check*.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39)

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang .

a. Kejelasan Kebijakan

Pengimplementasian suatu kebijakan merupakan puncak dari suatu peraturan ataupun kebijakan tersebut dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Pada Desa Kembang Kuning dan Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai kejelasan kebijakan cukup baik, kejelasan kebijakan dari program pamsimas adalah sebagai penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang berkualitas untuk masyarakat hal ini juga dapat dilihat dari adanya tulisan pada tong-tong pamsimas, serta sebagai upaya memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat, serta mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat sesuai dengan Pasal 5 *Undang-Undang* No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi Implementasi dan kinerja kebijakan, Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan.,

b. Sasaran Kebijakan

Menurut Wahab (2008:50) yang dimaksud dengan kelompok sasaran atau target group adalah “individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijaksanaan atau program yang diharapkan memberi akibat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sasaran kebijakan cukup baik, Program ini kelompok sasarannya adalah masyarakat (tiap keluarga) yang menjadi pengguna sarana ini sebelum program masuk sudah mendaftarkan diri untuk menjadi pengguna serta aktif dalam kontribusinya seperti pembayaran iuran tiap bulan sesuai dengan banyaknya pemakaian air yang digunakan tiap keluarga (rumah)”.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi Implementasi. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

2. Sumber daya

Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan .

a. Adanya dukungan finansial

Finansial memang erat kaitannya dengan uang, Jika kita dengan tentang masalah finansial, maka itu berarti masalah keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara , observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan mengenai adanya dukungan finansial cukup baik, Warga yang berminat cukup membayar Rp. 2.000 per meter kubik, lebih ringan dari beban pemakaian air yang dikenakan perusahaan air minum daerah yang ada, uang tersebut digunakan lagi untuk pengelolaan PAMSIMAS, serta ada anggaran dari pemerintah untuk pembangunan PAMSIMAS ,

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial

b. Adanya sumber daya manusia yang memadai

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi,

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dukungan sumber daya manusia yang memadai belum baik, karena tidak ada partisipasi dari masyarakat desa dalam pengelolaan PAMSIMAS sehingga SDM yang ada tidak memadai.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan .

3. Komunikasi antar badan pelaksana

Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosuder yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.

a. Koordinasi antar instansi

Koordinasi ialah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar instansi cukup baik, Instansi yang terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai penanggung jawab dan masyarakat Desa Tengah sebagai pelaksana kegiatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosuder yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.

b. Komunikasi antar pelaksana

Komunikasi ialah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa mengenai koordinasi antar pelaksana cukup baik, para pelaksana terutama pemerintah desa bekerja sama satu sama lain dan menjalin hubungan baik dalam penerapan atau menjalankan kebijakan PAMSIMAS.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosuder yang dicanangkan

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengImplementasian kebijakan.

a. Adanya dukungan birokrasi

Adanya dukungan birokrasi adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang baik itu moril maupun material untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara ,observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan dukungan birokrasi cukup baik karena ada dukungan birokrasi melalui pendanaan dari sumber pemerintah yang dapat mendukung pelaksanaan program Pamsimas yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). .

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) dukungan pemerintah diperlukan dalam upaya keberhasilan suatu Implementasi kebijakan

b. Hubungan Ekstenal Birokrasi

Birokrasi seringkali digunakan sebagai terminologi yang merefleksikan pemerintah,

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa hubungan internal birokrasi cukup baik, para pelaksana terutama pemerintah desa bekerja sama satu sama lain dan menjalin hubungan baik dalam penerapan atau menjalankan kebijakan PAMSIMAS..

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) koordinasi antara kelompok pendamping , LKMD, kepala desa dan aparat desa telah berhasil meyakinkan dan menjelaskan dengan baik arti penting IDT, sehingga kelompok sasaran mampu memahami dan bertanggung jawab atas program yang dijalankan

5. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah Implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan Implementasi kebijakan itu sendiri Adapun indikator dalam kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari - hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan lingkungan sosial belum baik karena tidak adanya rasa kebersamaan dan kerjasama masyarakat dalam mengelola Pamsimas

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) Lingkungan sosial dalam ranah Implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan Implementasi kebijakan itu sendiri

b. Lingkungan Ekonomi

Lingkungan ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara , observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi cukup baik karena masyarakat terbantu dari segi ekonomi karena dapat mengakses air yang berkualitas dengan harga yang sangat murah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) Lingkungan ekonomi dalam ranah Implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan.

c. Lingkungan Politik

Lingkungan politik adalah adalah hukum, instansi pemerintah dan kelompok yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu dalam suatu masyarakat tertentu(pemerintah dan yang berkenaan dengan sipil).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan lingkungan politik

cukup baik karena bantuan ini sangat bagus dan pemerintah dipandang baik dimata masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) Lingkungan politik dalam ranah Implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan Implementasi kebijakan itu sendiri.

6. Sikap pelaksana

Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam Implementasi Kebijakan.

a. Pemahaman terhadap program

Pemahaman adalah proses psikologis yang terkait dengan objek abstrak atau fisik, Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Pada Desa Kembang Kuning dan Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai pemahaman program cukup baik karena pemahaman program sudah dipahami oleh pelaksana teknis.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) sikap pelaksana terImplementasikan dengan pemahaman program oleh badan pelaksana.

b. Sikap atas kebijakan

Sikap adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat bahwa Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Pada Desa Kembang Kuning dan Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai sikap atas kebijakan cukup baik, karena segala aspek yang terlibat dalam pamsimas sangat antusias terhadap program ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) sikap pelaksana terImplementasikan dari sikap atas kebijakan.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Pada Desa Kembang Kuning dan Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara :

a. Faktor Pendukung

1. Adanya dukungan finansial dalam menunjang PAMSIMAS

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Pada Desa Kembang Kuning dan Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah adanya dukungan finansial dalam kebijakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017:38-39) Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan . hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan Implementasi

kebijakan dengan kinerja baik.. evaluasi program atau kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.

b. Faktor Penghambat

1. Sosial Budaya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan faktor yang menghambat Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Pada Desa Kembang Kuning dan Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagian warga lebih memilih menggunakan air sungai dengan alasan sudah terbiasa menggunakan air sungai sehingga sebagian mereka menolak menggunakan pamsimas.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola Pamsimas

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan faktor yang menghambat Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Pada Desa Kembang Kuning dan Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara kurangnya partisipasi masyarakat dalam pamsimas, padahal seharusnya sesuai dengan namanya berbasis masyarakat ,pamsimas harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun dalam pengelolaan namun hal tersebut tidak dilakukan masyarakat karena masyarakat merasa hal tersebut bukan tanggung jawabnya.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Pada Desa Kembang Kuning dan Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik hal ini dapat dilihat dari: Pertama) standar dan sasaran kebijakan, meliputi kejelasan kebijakan cukup baik dan sasaran kebijakan cukup baik, Program ini kelompok sasarannya adalah masyarakat. Kedua) Sumber daya, meliputi adanya dukungan finansial belum terkelola dengan baik, adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai belum baik. Ketiga) Komunikasi antar badan pelaksana meliputi koordinasi antar instansi cukup baik, koordinasi antar pelaksana cukup baik. Keempat) Karakteristik badan pelaksana meliputi dukungan birokrasi cukup baik. Kelima) Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik meliputi lingkungan sosial belum baik karena tidak adanya rasa kebersamaan dan kerjasama masyarakat dalam mengelola Pamsimas karena seharusnya pamsimas melibatkan lingkungan sosial masyarakat, karena masyarakat terbantu dari segi ekonomi karena dapat mengakses air yang berkualitas, dan lingkungan politik cukup baik karena bantuan ini sangat bagus dan pemerintah dipandang baik dimata masyarakat. Keenam) Sikap pelaksana meliputi pemahaman program cukup baik dan sikap atas kebijakan cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi dua yaitu : 1) Faktor pendukung, adalah adanya dukungan finansial dalam menunjang pamsimas 2) Faktor penghambat meliputi : Masyarakat desa mempunyai kebiasaan menggunakan air sungai sejak zaman dahulu sehingga sebagian masyarakat menolak menggunakan bantuan pamsimas dan kurangnya partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administrais*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. et al. (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH



KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.